



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 47/M.EKON/10/2004

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH INDONESIA
MEMBICARAKAN *OUT OF COURT SETTLEMENT* MASALAH
PT. KARAHA BODAS COMPANY**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan PT. Karaha Bodas Company perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi timbulnya kerugian Pemerintah seminimal mungkin;
 - b. bahwa langkah-langkah *Out of Court Settlement* yang telah dilakukan selama ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan PT. Karaha Bodas Company perlu segera dilanjutkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Pemerintah Indonesia Membicarakan *Out of Court Settlement* Masalah PT. Karaha Bodas Company;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

3. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

- Perhatikan : 1. Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor R-45 Tanggal 31 Mei 2002 perihal Rencana Pembangunan PLTP Karaha Bodas.
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-143/M.EKON.06/2002 tanggal 11 Juni 2002 perihal Permasalahan Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas Company (KBC).
 3. Hasil pembahasan masalah PT. Karaha Bodas Company antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Menteri-Menteri terkait pada tanggal 27 Oktober 2004.
 4. Hasil pembahasan masalah PT. Karaha Bodas Company antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Menteri-Menteri terkait pada tanggal 5 November 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH INDONESIA MEMBICARAKAN *OUT OF COURT SETTLEMENT* MASALAH PT. KARAHA BODAS COMPANY**

PERTAMA : ...

- a. Sdr. Nalin Rathod (Penasehat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian);
- b. Sdr. Richard Claproth (Penasehat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara);

untuk melakukan pembicaraan dengan wakil dari PT. Karaha Bodas Company dalam rangka *Out of Court Settlement* permasalahan antara PT. Karaha Bodas Company dengan Pemerintah Indonesia.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Sdr. Nalin Rathod dan Sdr. Richard Claproth bertanggungjawab dan melaporkan secara berkala perkembangan *Out of Court Settlement* tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,



Drs. F.X. DASUKI, MM
NIP. 060034251